

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA JANJI UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 543/PDT/2019/PT DKI)

OLEH

MUHAMMAD AFIQ ALGIFARI

E1A017218

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum akibat tidak dipenuhinya janji untuk melaksanakan perkawinan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi penggugat akibat tidak dipenuhinya janji untuk melaksanakan perkawinan dalam Putusan Nomor 543/PDT/2019/PT DKI.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif dengan cara mendialogkan antara teori hukum, norma hukum, hasil penelitian dan analisis yang dihubungkan antara satu dengan lainnya sesuai dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 543/PDT/2019/PT DKI., dapat disimpulkan bahwa Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatannya dikualifisir melanggar unsur hak subjektif orang lain, kaidah kesusilaan, dan kepatutan yang ada di masyarakat. Majelis Hakim melalui pertimbangannya mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat karena perbuatan Tergugat memenuhi seluruh syarat perbuatan melawan hukum secara kumulatif yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata berupa ganti rugi materiil sebesar Rp108.444.544,00 (seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

Kata Kunci: perbuatan melawan hukum, ganti rugi, ingkar janji untuk mengawini

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF UNLAWFUL ACTS DUE TO THE BROKEN
PROMISE TO CARRY OUT MARRIAGE
(CASE STUDY: VERDICT NUMBER 543/PDT/2019/PT DKI)**

BY

MUHAMMAD AFIQ ALGIFARI

E1A017218

This research examines and answers the question of how the judge's legal considerations in qualifying the elements of unlawful acts due to the non-fulfillment of the promise to carry out the marriage and how the judge's legal consideration in granting the Plaintiff's compensation claim due to not fulfilling the promise to carry out the marriage in Verdict Number 543/PDT/2019/PT DKI.

This research is a type of normative research that is prescriptive. The type of data used is secondary data that includes primary legal materials and secondary legal materials. The method of data collection used is a literature study that will be presented in the form of narrative text by cataloging between legal theories, legal norms, research results and analysis that are connected with each other in accordance with the subject matter.

Based on the results of research and discussion of the Jakarta High Court Verdict Number 543/PDT/2019/PT DKI., it can be concluded that the Defendant was declared to have committed unlawful acts and his actions can be qualified to violate the elements of the subjective rights of others, the rules of decency, and propriety in the community. The Panel of Judges through its consideration granted plaintiff's damages claim because the defendant's actions met all the conditions of unlawful acts cumulatively stipulated in Article 1365 of the Civil Code in the form of material damages amounting to Rp108,444,544.00 (one hundred eight million four hundred forty-four thousand five hundred and forty-four rupiah) and immateriil damages of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) based on the evidence submitted by the Plaintiff.

Keywords: tort, compensation, broken the promise of marriage